

## MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JL. Raya Kebun Cengkih Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Kota Ambon, Maluku 97128 Website : pta-ambon.go.id - E-mail : surat@pta-ambon.go.id

## SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor: 53 /KPTA.W24-A/KP4.1.3/I/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.

Nip

: 19590117 198903 1 001

Pangkat /Gol.Ruang

: Pembina Utama (IV/e)

Jabatan

: Hakim Utama /Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama

: Onny Ulath, S.H.I.

Nip

: 19700505 200312 2 003

Pangkat / Gol.Ruang

: Penata Tk. I (III/d)

Jabatan

: Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Pada tanggal 31 Desember 2024 masih menduduki Jabatan Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:2786/SEK/SK.KP4.1.3/IV/2024 tanggal 29 April 2024 dan pada tanggal 01 Januari 2025 masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 26 Tahun 2007 Sdri. Onny Ulath, S.H.I. berhak menerima tunjangan jabatan Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebesar Rp. 540.000,- ( lima ratus empat puluh ribu rupiah ) setiap bulan, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon

Sahradin /

Ambon, 06 Januari 2025

Pejabat Yang Membuat Pernyataan,

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;

2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RL Jakarta;

3. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Jakarta;

4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Jakarta;

5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;

6. Kepala Kantor KPPN Ambon;

7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);

8. Pegawai yang bersangkutan.